

ABSTRAKSI

Studi ini mengkaji perilaku politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam artikulasi Islam politik dan demokrasi di Indonesia, dimulai semenjak berdirinya tahun 1973 hingga tahun 1999.

Transformasi politik PPP dalam kurun waktu tersebut menunjukkan dinamika politik yang jamak. Pada periode awal (1973-1985), semangat piagam Jakarta mendorong PPP bersikap tegas dalam perjuangan menegakkan syariat Islam (formalisme agama). Sifat ideologis dalam setiap tindakan dan perilaku politik PPP telah mengakibatkan konfrontasi terus-menerus PPP dengan rezim orde baru. Namun, mainstream politik rezim yang lebih kuat dan hegemonik selalu mengalahkan perjuangan ideologis tersebut.

Pada periode kedua (1985-1998), restrukturisasi politik oleh rezim memaksa PPP menanggalkan simbol ideologisnya, yakni asas Islam dan lambang ka'bah. Asas pancasila menjadikan PPP kehilangan vitalitasnya sebagai kekuatan politik bagi ummat Islam. Dalam konteks demikian, PPP tampil dengan strategi 'politik sejuk'. Politik sejuk adalah wujud dari respon PPP yang bersifat korporatis kepada kekuasaan rezim yang hegemonik. Politik korporatis berkembang seiring dengan menguatnya akomodasi politik negara terhadap kekuatan ummat Islam yang tidak lagi dianggap berbahaya. Sebaliknya, Islam bahkan dapat menjadi sumber legitimasi baru bagi kekuasaan rezim.

Runtuhnya rezim orde baru membuka periode baru dalam konstelasi politik nasional, dengan ditandai munculnya banyak partai baru. Hadirnya partai-partai baru dengan basis dukungan tradisional masing-masing menghantui para elit PPP. Untuk mempertahankan eksistensinya, seraya berharap dapat kembali membangkitkan semangat kejayaan Islam politik di masa lalu, PPP mengambil langkah yang strategis. Lewat muktamarnya yang ke-IV, PPP memutuskan untuk kembali ke 'khittah'-nya yakni kembali berasas Islam dan berlambang ka'bah. Jaddi, kepentingan politik dibalik keputusan tersebut menyimpulkan kuatnya pragmatisme politik dalam PPP. Kegundahan elit di tengah ketatnya persaingan di era multi partai menjadi faktor dominan langkah politik tersebut.

Pragmatisme politik semakin menjadi tonggak pada saat PPP menolak calon Presiden wanita. Demi target tertentu dibalik dukungannya terhadap Habibie, PPP menolak Megawati yang dicalonkan PDI Perjuangan. Bahkan, dalam kerangka pragmatisme ini, PPP menggunakan justifikasi agama untuk memperkuatnya.

Demikianlah, dinamika politik PPP telah menunjukkan bentuknya yang kompleks. Dinamika tersebut merupakan respon politik PPP terhadap transformasi pemikiran dan sistem politik yang sedang berkembang.

Sekian.